

Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui Analisis Gap antara Potensi dan Realisasi (Studi Empiris pada SAMSAT Kota Subulussalam)

Risnawati Syaputri Bancin

Politeknik Unggul LP3M Medan

Abstrak

Penelitian ini membahas perbandingan antara potensi dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta faktor-faktor yang memengaruhinya pada Samsat Kota Subulussalam. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, potensi penerimaan pajak seharusnya juga mengalami peningkatan, namun dalam praktiknya masih ditemukan kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dianalisis meliputi jumlah kendaraan bermotor, perhitungan potensi pajak berdasarkan jenis kendaraan, serta realisasi penerimaan pajak pada periode penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi penerimaan PKB mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, di mana kendaraan jenis sepeda motor dan minibus menjadi penyumbang terbesar terhadap potensi penerimaan pajak. Namun, realisasi penerimaan yang dicapai masih jauh di bawah potensi yang tersedia sehingga tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor masih tergolong rendah. Kesenjangan antara potensi dan realisasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kondisi ekonomi masyarakat, kesibukan wajib pajak, rendahnya pemahaman mengenai kewajiban perpajakan, sikap acuh terhadap pajak, serta sosialisasi yang belum optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tidak hanya bergantung pada besarnya potensi yang dimiliki, tetapi juga pada efektivitas sistem pemungutan pajak dan tingkat kesadaran wajib pajak, sehingga diperlukan upaya yang lebih komprehensif melalui peningkatan kualitas pelayanan, penguatan sistem administrasi, serta optimalisasi sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan efektivitas penerimaan pajak daerah.

Kata Kunci: potensi pajak, realisasi pajak, pajak kendaraan bermotor, kepatuhan wajib pajak

Abstract

This study discusses the comparison between the potential and realization of Motor Vehicle Tax (PKB) revenue and the factors influencing it at the Samsat Office of Subulussalam City. Motor vehicle tax is one of the main sources of Regional Original Revenue (PAD) and plays a strategic role in supporting regional development financing. As the number of motor vehicles increases, the potential for tax revenue is expected to grow; however, in practice, a gap still exists between the potential and the actual realization of motor vehicle tax revenue. This study applies a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. The analyzed data include the number of registered motor vehicles, the calculation of tax potential based on vehicle types, and the realization of tax revenue during the research period. The results show that the potential revenue from motor vehicle tax has increased in line with the growth in the number of vehicles, with motorcycles and minibuses contributing the largest share. Nevertheless, the realized revenue remains significantly below the available potential, indicating that the effectiveness of tax collection is still relatively low. The gap between potential and realization is influenced by several factors, including economic conditions, taxpayers' busyness, limited understanding of tax obligations, indifferent attitudes toward taxation, and suboptimal socialization. These findings indicate that improving motor vehicle tax revenue requires not only a strong potential base but also effective tax administration and increased taxpayer awareness, so that more comprehensive efforts

are needed through improving service quality, strengthening administrative systems, and optimizing public awareness programs to enhance taxpayer compliance and increase the effectiveness of regional tax revenue.

Keywords: *tax potential, tax realization, motor vehicle tax, taxpayer compliance*

Copyright (c) 2026 Risnawati Syahputri Bancin

✉ Corresponding author :

Email Address : putribancin09@gmail.com

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks otonomi daerah, pajak juga menjadi komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menentukan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah (Cahyani et al., 2025). Pengelolaan pajak yang optimal, baik dari aspek kebijakan maupun administrasi, menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas penerimaan daerah. Komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan kontributor terbesar dibandingkan komponen lainnya, seperti retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah (Pasaribu & Syakira, 2025). Hal ini menegaskan bahwa optimalisasi penerimaan pajak daerah menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Uraian	Anggaran/Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Pendapatan Daerah	1.180.504,17 M	113.189,34 M	9,59
PAD	428.526,42 M	34.621,39 M	8,08
Pajak Daerah	305.808,10 M	27.353,39 M	8,94
Retribusi Daerah	72.191,89 M	3.759,97 M	5,21
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.476,54 M	1.736,82 M	12,00
Lain-lain PAD yang Sah	36.049,90 M	1.771,21 M	4,91
TKDD	693.209,05 M	77.323,72 M	11,15

Berdasarkan Tabel 1, komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan kontributor terbesar dibandingkan komponen lainnya. Dari total PAD sebesar 428.526,42 M, realisasi penerimaan pajak daerah mencapai 27.353,39 M, jauh lebih tinggi dibandingkan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maupun lain-lain PAD yang sah. Kondisi ini menegaskan bahwa pajak daerah memiliki peran yang dominan dalam mendukung penerimaan daerah. Namun demikian, jika dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan, realisasi PAD secara keseluruhan masih relatif rendah, yang menunjukkan bahwa potensi penerimaan belum sepenuhnya tergali secara optimal.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan daerah, pemerintah dituntut untuk mampu mengoptimalkan potensi pajak yang dimiliki. Salah satu indikator keberhasilan pengelolaan pajak daerah dapat dilihat dari perbandingan antara potensi pajak dengan realisasi penerimaan yang berhasil dihimpun (Veronika & Akbar, 2021). Potensi pajak mencerminkan kemampuan maksimal penerimaan dalam kondisi ideal, sedangkan realisasi menunjukkan capaian aktual yang diterima oleh pemerintah daerah (Lukypa et al., 2023).

Perbedaan antara keduanya menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas sistem pemungutan pajak serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber PAD yang strategis karena memiliki kontribusi yang signifikan dan bersifat berkelanjutan. Hal ini didukung oleh pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat dari waktu ke waktu (Saputra et al., 2025). Di berbagai daerah, termasuk Kota Subulussalam, PKB menjadi salah satu sumber pendapatan yang diandalkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik. Namun demikian, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh optimalisasi realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Seiring dengan peran strategis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan besarnya potensi penerimaan pajak. Data menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor di Kota Subulussalam mengalami peningkatan dari 32.603 unit pada tahun 2023 menjadi 35.779 unit pada tahun 2024. Peningkatan ini seharusnya mampu mendorong kenaikan potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor secara signifikan.

Namun demikian, peningkatan jumlah kendaraan bermotor tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan yang cukup besar antara potensi dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Pada tahun 2023, potensi penerimaan mencapai Rp29.289.000.000, sedangkan realisasi hanya sebesar Rp8.190.000.000. Kondisi serupa juga terjadi pada tahun 2024, di mana potensi meningkat menjadi Rp32.814.000.000, namun realisasi hanya mencapai Rp9.114.000.000. Kesenjangan yang signifikan antara potensi dan realisasi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor belum berjalan secara optimal. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam efektivitas sistem pemungutan pajak serta rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesenjangan tersebut, sehingga dapat dirumuskan strategi yang tepat dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Fakta empiris menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (Fanida et al., 2025). Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa penerimaan pajak belum mampu digali secara maksimal. Beberapa faktor yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, keterlambatan pembayaran pajak, serta masih adanya kendaraan yang tidak melakukan registrasi ulang secara berkala (Fitriani et al., 2026). Selain itu, kendala administratif dan kurangnya kesadaran masyarakat juga menjadi faktor yang turut berkontribusi terhadap belum optimalnya penerimaan pajak kendaraan bermotor (Raodah & Umam, 2026).

Permasalahan kesenjangan antara potensi dan realisasi ini menjadi isu yang krusial, karena secara langsung berdampak pada kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD. Ketidakefektifan penerimaan pajak dapat menghambat pelaksanaan pembangunan daerah serta mengurangi efektivitas pelayanan publik. Diperlukan analisis yang komprehensif untuk mengidentifikasi penyebab kesenjangan tersebut serta merumuskan strategi yang tepat dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya optimalisasi penerimaan pajak daerah sebagai salah satu indikator keberhasilan tata kelola keuangan daerah. Peningkatan penerimaan PKB tidak hanya berdampak pada aspek fiskal, tetapi juga mencerminkan tingkat kepatuhan masyarakat serta efektivitas sistem administrasi perpajakan. Dengan optimalnya penerimaan pajak, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yang mengintegrasikan perhitungan potensi pajak kendaraan bermotor dengan evaluasi realisasi penerimaan secara aktual pada tingkat

daerah. Selain itu, penelitian ini juga menguraikan faktor-faktor yang memengaruhi kesenjangan antara potensi dan realisasi, khususnya dari aspek kepatuhan wajib pajak dan efektivitas sistem administrasi.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis perbandingan antara potensi dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor serta faktor-faktor yang memengaruhinya (Rohita, 2021). Penelitian dilaksanakan di Kantor Samsat Kota Subulussalam, Aceh, yang dipilih karena merupakan instansi yang secara langsung menangani pengelolaan dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Objek dalam penelitian ini adalah potensi dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sedangkan subjek penelitian meliputi pegawai Samsat serta pihak-pihak terkait yang memiliki informasi mengenai proses pemungutan pajak kendaraan bermotor (Wajdi et al., 2024). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung proses pelayanan dan pemungutan pajak, wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mendalam terkait kendala serta faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak, sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa laporan dan data penerimaan pajak kendaraan bermotor (Sukmadinata, 2015). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data untuk membandingkan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya (Miles and Huberman, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor Kota Subulussalam

Tahun	Jumlah Kendaraan (Unit)	Pertumbuhan (%)
2023	32.603	-
2024	35.779	9,75%
2025	38.200	6,76%

Sumber: Samsat Kota Subulussalam, 2025

Berdasarkan Tabel 1, jumlah kendaraan bermotor di Kota Subulussalam mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 32.603 unit, kemudian meningkat menjadi 35.779 unit pada tahun 2024 atau tumbuh sebesar 9,75%. Selanjutnya, pada tahun 2025 diperkirakan meningkat menjadi 38.200 unit dengan pertumbuhan sebesar 6,76%. Peningkatan ini menunjukkan tren pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup signifikan, yang secara langsung berpotensi meningkatkan potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Potensi dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor

Tabel 2. Potensi dan Realisasi PKB

Tahun	Potensi (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Efektivitas (%)
2023	29.289.000.000	8.190.000.000	21.099.000.000	28%
2024	32.814.000.000	9.114.000.000	23.700.000.000	28%
2025	35.500.000.000	10.800.000.000	24.700.000.000	30%

Sumber: Samsat Kota Subulussalam, 2025

Berdasarkan Tabel 2, potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, potensi penerimaan sebesar Rp29,28 miliar dengan realisasi Rp8,19 miliar. Pada tahun 2024, potensi meningkat menjadi Rp32,81 miliar dengan realisasi sebesar Rp9,11 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2025 diperkirakan potensi mencapai Rp35,5 miliar dengan realisasi sebesar Rp10,8 miliar. Meskipun mengalami

peningkatan, terdapat selisih yang cukup besar antara potensi dan realisasi setiap tahunnya. Tingkat efektivitas penerimaan juga masih relatif rendah, yaitu berkisar antara 28% hingga 30%, yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor belum optimal.

Potensi PKB Berdasarkan Jenis Kendaraan (2025)

Tabel 3. Potensi PKB Berdasarkan Jenis Kendaraan

Jenis Kendaraan	Jumlah	Potensi (Rp)	Kontribusi (%)
Sepeda Motor	31.607	8.320.542.750	25%
Minibus	2.338	12.151.755.000	37%
Pickup	1.102	5.689.320.000	17%
Light Truck	383	3.793.998.000	12%
Jeep	275	2.161.293.750	7%
Lainnya	74	697.090.500	2%
Total	35.779	32.814.000.000	100%

Sumber: Samsat Kota Subulussalam, 2025

Berdasarkan Tabel 3, potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2024 didominasi oleh kendaraan jenis minibus dengan kontribusi sebesar 37%, diikuti oleh sepeda motor sebesar 25%. Kendaraan jenis pickup dan light truck juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap total potensi penerimaan. Kendaraan jenis lain seperti sedan, bus, dan microbus memiliki kontribusi yang relatif kecil karena jumlahnya yang terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa struktur potensi pajak kendaraan bermotor di Kota Subulussalam sangat dipengaruhi oleh dominasi kendaraan pribadi dan kendaraan operasional ringan.

Perbandingan Antara Potensi Dan Realisasi Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian, potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Subulussalam menunjukkan peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Pada tahun 2023, potensi penerimaan tercatat sebesar Rp29.289.000.000, kemudian meningkat pada tahun 2024 menjadi sekitar Rp32.814.000.000. Peningkatan potensi ini sejalan dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar, yaitu dari 32.603 unit pada tahun 2023 menjadi 35.779 unit pada tahun 2024. Di sisi lain, realisasi penerimaan PKB juga mengalami kenaikan, dari Rp8.190.000.000 pada tahun 2023 menjadi Rp9.114.000.000 pada tahun 2024. Namun, walaupun nominal realisasi meningkat, capaian tersebut masih jauh di bawah potensi yang tersedia dan tingkat efektivitas penerimaan masih berada pada kisaran 32%, sehingga dikategorikan belum efektif.

Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kendaraan bermotor belum secara otomatis diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak secara optimal. Dengan kata lain, pertumbuhan basis objek pajak belum mampu dikonversi menjadi realisasi pendapatan yang proporsional. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya gap yang cukup besar antara kemampuan penerimaan secara teoritis dengan capaian aktual di lapangan. Selisih ini menjadi indikator bahwa masih terdapat potensi pajak yang belum tergali secara maksimal oleh pemerintah daerah melalui Samsat Kota Subulussalam.

Secara teoritis, potensi pajak dipahami sebagai kemampuan pemungutan pajak dalam kondisi ideal, yaitu ketika seluruh objek pajak dapat terdata, tertagih, dan dibayarkan tanpa hambatan berarti. Dalam penelitian ini, potensi PKB dihitung berdasarkan jumlah kendaraan bermotor, nilai jual kendaraan bermotor (NJKB), bobot, dan tarif pajak. Sementara itu, realisasi pajak merupakan jumlah penerimaan yang benar-benar berhasil dihimpun dalam periode tertentu. Ketika realisasi jauh berada di bawah potensi, maka hal tersebut menandakan bahwa efektivitas sistem pemungutan belum berjalan maksimal. Dengan demikian, teori potensi dan realisasi pajak mendukung hasil penelitian ini, karena data empiris di Samsat Kota Subulussalam memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara penerimaan ideal dan penerimaan aktual.

Secara teori administrasi perpajakan, kondisi ini juga dapat dijelaskan melalui pentingnya kualitas pengelolaan pajak daerah. Administrasi pajak yang baik tidak hanya berorientasi pada pencatatan dan penetapan target, tetapi juga pada efektivitas penagihan, kemudahan pelayanan, dan kemampuan lembaga dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Walaupun jumlah kendaraan meningkat, jika sistem penagihan belum optimal, pengawasan belum kuat, dan pelayanan belum sepenuhnya menjangkau seluruh wajib pajak, maka realisasi penerimaan tetap akan tertinggal dari potensi. Hal inilah yang tampak pada kondisi Samsat Kota Subulussalam.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Mustar et al., 2025) yang menjelaskan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor memiliki potensi yang besar, tetapi belum terkelola secara optimal karena realisasi belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Penelitian (Dewi & Tanno, 2026) yang menegaskan bahwa analisis potensi dan realisasi penerimaan PKB dapat menunjukkan tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah. Penelitian (Septiana et al., 2025) mendukung temuan ini, bahwa UPTD Samsat masih memiliki peluang untuk meningkatkan penerimaan apabila potensi pajaknya digali secara lebih optimal (Afandi, 2025). Dengan demikian, hasil penelitian pada Samsat Kota Subulussalam memperkuat temuan terdahulu bahwa persoalan utama bukan terletak pada kecilnya potensi, melainkan pada belum optimalnya realisasi (Bu'ulolo, 2025).

Dalam implementasinya pada Kantor Samsat Kota Subulussalam, hasil ini mengindikasikan perlunya penguatan pada beberapa aspek operasional. Pertama, perlu dilakukan pemutakhiran data kendaraan bermotor secara berkala agar objek pajak yang aktif, menunggak, dan tidak melakukan registrasi ulang dapat teridentifikasi dengan lebih akurat. Kedua, Samsat perlu memperkuat strategi penagihan aktif, khususnya terhadap wajib pajak yang telah jatuh tempo tetapi belum melakukan pembayaran. Ketiga, pelayanan perpajakan perlu semakin ditingkatkan agar masyarakat memperoleh kemudahan dalam membayar pajak, baik melalui pelayanan langsung maupun pemanfaatan media digital. Keempat, perlu ada evaluasi target tahunan yang tidak hanya didasarkan pada kecenderungan nominal tahun sebelumnya, tetapi juga pada analisis riil terhadap potensi kendaraan yang terdaftar.

Implikasi penelitian dari rumusan masalah pertama ini adalah bahwa pemerintah daerah, khususnya Samsat Kota Subulussalam, tidak cukup hanya berfokus pada pertumbuhan jumlah kendaraan sebagai indikator keberhasilan fiskal. Yang lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan tersebut dapat diubah menjadi penerimaan nyata melalui tata kelola yang efektif. Temuan ini juga menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pengelolaan PKB harus dilihat dari kedekatan antara potensi dan realisasi, bukan sekadar dari kenaikan nominal penerimaan dari tahun ke tahun. Semakin kecil selisih antara potensi dan realisasi, semakin baik pula tingkat efektivitas pengelolaan pajak kendaraan bermotor.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Potensi Dan Realisasi Penerimaan

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan lapangan, penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi potensi dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Subulussalam, yaitu faktor ekonomi, kesibukan wajib pajak, kurangnya pemahaman mengenai kewajiban pajak, sikap acuh tak acuh terhadap pajak, serta efektivitas sosialisasi yang masih terbatas. Faktor-faktor tersebut berpengaruh terutama terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya menentukan tinggi rendahnya realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama rendahnya realisasi penerimaan. Keterbatasan kemampuan finansial menyebabkan sebagian masyarakat belum menempatkan pembayaran pajak kendaraan sebagai prioritas (Angraini & Danang Adi Putra, 2025). Dalam kondisi pendapatan yang terbatas, kebutuhan rumah tangga sehari-hari cenderung lebih diutamakan dibandingkan kewajiban pajak. Akibatnya, walaupun kendaraan bermotor tetap dimiliki dan digunakan, kewajiban membayar PKB sering ditunda. Hasil penelitian ini

memperlihatkan bahwa besarnya potensi pajak tidak sepenuhnya dapat direalisasikan apabila kondisi ekonomi masyarakat belum mendukung kemampuan membayar tepat waktu.

Faktor kesibukan juga berpengaruh terhadap realisasi penerimaan. Aktivitas pekerjaan sehari-hari menyebabkan sebagian wajib pajak menunda pembayaran, terutama ketika mereka menganggap proses pembayaran pajak memerlukan waktu, tenaga, dan perhatian khusus (Sari et al., 2025). Pada penelitian ini, keterlambatan membayar bukan selalu karena penolakan, melainkan juga karena rendahnya prioritas terhadap kewajiban perpajakan di tengah rutinitas masyarakat (Bhastary et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa aspek perilaku dan manajemen waktu wajib pajak menjadi unsur yang cukup menentukan dalam pencapaian realisasi pajak (Nasib et al., 2023).

Selanjutnya, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pajak juga terbukti mempengaruhi rendahnya kepatuhan. Sebagian masyarakat belum memahami bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk kontribusi langsung terhadap pembangunan daerah dan pelayanan publik. Ketika pemahaman pajak masih rendah, maka kesadaran untuk memenuhi kewajiban juga cenderung lemah. Teori kepatuhan pajak dalam dokumen penelitian ini menjelaskan bahwa kepatuhan merupakan keadaan ketika wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dengan demikian, rendahnya pemahaman akan menurunkan tingkat kepatuhan dan pada akhirnya menekan realisasi penerimaan.

Selain itu, penelitian ini menemukan adanya sikap acuh tak acuh dari sebagian wajib pajak. Sebagian masyarakat memandang pajak sebagai beban yang dapat ditunda, bukan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi secara tertib (Karolin et al., 2024). Sikap seperti ini memperlihatkan bahwa persoalan penerimaan pajak tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membayar, tetapi juga dengan budaya kepatuhan (Sihombing et al., 2019). Dalam kerangka teori self assessment system, keberhasilan pemungutan pajak sangat dipengaruhi oleh kejujuran, kesadaran, dan kemauan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara benar (Lestari & Nasib, 2021). Walaupun PKB secara teknis dikelola melalui sistem administrasi Samsat, semangat kepatuhan sukarela tetap menjadi unsur penting. Karena itu, ketika sikap acuh tak acuh masih tinggi, maka realisasi pajak akan sulit mendekati potensi yang tersedia.

Faktor lain yang juga menonjol adalah efektivitas sosialisasi yang masih terbatas (Pratiwi & Heriyanto, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi memang telah dilakukan melalui media sosial, spanduk, dan kunjungan ke desa-desa, tetapi jangkauannya belum sepenuhnya efektif, terutama untuk wilayah yang relatif terpencil (Inrawan et al., 2022). Artinya, upaya edukasi perpajakan sudah ada, tetapi belum merata dan belum cukup kuat untuk mengubah perilaku wajib pajak secara menyeluruh.

Temuan tentang faktor-faktor tersebut didukung oleh penelitian terdahulu. Penelitian (Khatimah et al., 2026) (Indriyanti et al., 2025) menjelaskan bahwa realisasi penerimaan dan intensifikasi pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap potensi PAD. Penelitian (Putra & Merkusiwati, 2025) menunjukkan bahwa potensi pajak daerah dapat memberikan kontribusi besar apabila realisasinya berjalan dengan semestinya. Sementara itu, penelitian (Manurung et al., 2025) memperlihatkan bahwa besarnya penerimaan dari PKB sangat ditentukan oleh kualitas pemungutan dan kemampuan pemerintah daerah mengelola sumber pajak yang tersedia. Dengan demikian, hasil penelitian di Samsat Kota Subulussalam konsisten dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa faktor kelembagaan, perilaku wajib pajak, dan efektivitas administrasi sangat menentukan keberhasilan realisasi pajak.

Implementasi pada Kantor Samsat Kota Subulussalam, maka hasil penelitian ini memberi arah yang cukup jelas. Dari sisi ekonomi masyarakat, Samsat dapat mendorong pembayaran lebih tepat waktu melalui pengingat jatuh tempo dan pendekatan pelayanan yang lebih mudah dijangkau. Dari sisi kesibukan wajib pajak, Samsat perlu memperluas alternatif pembayaran yang cepat dan praktis agar masyarakat tidak merasa terbebani oleh proses administrasi. Dari sisi pemahaman dan sikap, Samsat perlu memperkuat edukasi pajak

yang lebih persuasif, kontekstual, dan berkelanjutan, bukan hanya bersifat insidental. Dari sisi sosialisasi, strategi komunikasi publik perlu lebih diarahkan ke wilayah-wilayah dengan jangkauan informasi yang masih lemah, agar penyampaian informasi tidak berhenti pada kelompok masyarakat yang sudah relatif sadar pajak.

Implikasi penelitian dari rumusan masalah kedua adalah bahwa peningkatan realisasi PKB tidak dapat dilakukan hanya dengan menaikkan target atau mengandalkan pertumbuhan jumlah kendaraan. Peningkatan realisasi harus diikuti dengan strategi yang menyentuh akar masalah kepatuhan wajib pajak, yaitu kondisi ekonomi, tingkat pemahaman, perilaku masyarakat, dan efektivitas sosialisasi. Optimalisasi penerimaan PKB harus dilakukan secara menyeluruh melalui kombinasi antara pembenahan administrasi, peningkatan kualitas pelayanan, penguatan edukasi perpajakan, dan pendekatan yang lebih adaptif terhadap karakteristik masyarakat daerah. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan pajak kendaraan bermotor pada level daerah memerlukan pendekatan yang tidak hanya administratif, tetapi juga sosial dan edukatif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara potensi dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Samsat Kota Subulussalam. Meskipun potensi penerimaan meningkat seiring bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, realisasi yang dicapai masih belum optimal dan berada jauh di bawah potensi yang tersedia, sehingga menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan penerimaan pajak kendaraan bermotor masih tergolong rendah. Selain itu, potensi penerimaan PKB didominasi oleh kendaraan jenis sepeda motor dan minibus yang jumlahnya paling besar, namun peningkatan jumlah objek pajak tersebut belum diikuti oleh peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak. Rendahnya realisasi penerimaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kondisi ekonomi masyarakat, kesibukan wajib pajak, kurangnya pemahaman tentang kewajiban perpajakan, sikap acuh terhadap pajak, serta sosialisasi yang belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor memerlukan upaya yang lebih komprehensif melalui peningkatan kualitas pelayanan, penguatan sosialisasi, serta perbaikan sistem administrasi perpajakan guna mendorong kepatuhan wajib pajak.

Referensi:

- Afandi, R. (2025). Pengaruh Return on Equity dan Debt to Equity Ratio Terhadap Harga Saham Perusahaan Telekomunikasi : Analisis Empiris di BEI Pasca Transformasi Digital Periode 2022-2024. *Applied Multidisciplinary Science*, 1(2), 160-173. <https://doi.org/10.64276/ams.v1i2.65>
- Angraini, N., & Danang Adi Putra. (2025). FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB VARIASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI INDONESIA. *Management Ekonomi Dan Akuntansi*, 14(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31959/jm.v14i2.3074>
- Bhastary, M. D., Astuti, L., Silvana, E., Yuanda, F., Rico, R., & Antonio, S. (2025). Analisis Strategi Pemasaran pada Toko Sembako Zhafa di Kota Batam. *Applied Multidisciplinary Science* -, 1(2), 61-77. <https://doi.org/10.64276/ams.v1i2.56>
- Bu'ulolo, B. (2025). Peran Kantor Jasa Akuntan Aulia Rahman Dalam Meningkatkan Transparansi Laporan Keuangan Usaha Kecil Dan Menengah. *Applied Multidisciplinary Science*, 1(2), 111-117. <https://doi.org/10.64276/ams.v1i2.60>
- Cahyani, N. L. V. A., Shahirah, N. S., Raja, I. S. L., & Pangestoeti, W. (2025). Tantangan Dan Peluang Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah: Studi Di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(7). <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jiem.v3i7.5597>
- Dewi, R. C., & Tanno, A. (2026). Efek Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 5(3), 3482-

396. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/ekoma.v5i3.16024>
- Fanida, E. H., Fitrie, R. A., Maruf, M. F., Yustanika, N., Shafira, K., & Abdillah, D. C. (2025). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Madiun Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Dinamika Manajemen, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Di Era Digital*, 11(2).
- Fitriani, F., Abdi, M. N., & Syahriani, A. T. (2026). Analisis Kontribusi Pajak dan BEA Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan PAD Provinsi Sulawesi Selatan. *RIGGS*, 5(1), 3868–3874. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6713>
- Indriyanti, A., Roy, J., & Awaluddin, M. (2025). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Dampaknya terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 5(3), 1272–1280. <https://doi.org/https://doi.org/10.37481/jmeh.v5i3.1479>
- Inrawan, A., Lie, D., Nainggolan, L. E., Silitonga, H. P., & Sudirman, A. (2022). Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Kurs, Pertumbuhan Ekonomi, Capital Expenditure, dan Leverage Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Perusahaan Indeks LQ 45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Seminar Nasional Hasil Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sahid Surakarta*, 2, 136–155.
- Karolin, R. B., Utomo, M. N., & Priyati, R. Y. (2024). Pengaruh Realisasi Penerimaan Dan Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Dengan Jumlah Kendaraan Bermotor Sebagai Variabel Moderasi Di Bapenda Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Ekonomika*45, 11(2).
- Khatimah, K., Arsal, M., & Badollahi, I. (2026). Literature Review: Implementasi E-Samsat Dan Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1).
- Lestari, I., & Nasib, A. K. H. M. (2021). Manajemen & Bisnis Modern. In *Jakarta: PT Rineka Cipta*. Pena Persada.
- Lukypa, J., Manan, A., & Sujadi. (2023). Analisis Overlay Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Lombok Utara Tahun 2017-2021. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.57248/jishum.v1i4.158>
- Manurung, M., S.Parantean, R. C., Saerang, V. E., & Sakap, Y. (2025). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Merauke. *Jurnal Manajemen & Bisnis Kajian Ilmu Akuntansi & Bisnis*, 18(2).
- Miles and Huberman. (2022). *Analisis Data Kualitatif*.
- Mustar, F., TB, D. N. K. A. M., Dipa, A. K., & Sari, B. (2025). Dampak Literasi Perpajakan serta Pembayaran Digital terhadap Penerimaan Perpajakan Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi Bisnis Antartika*, 3(1), 47–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.70052/jeba.v3i1.649>
- Nasib, Pranata, S. P., Tampubolon, A., Novirsari, E., Amelia, R., Pasaribu, D. S. O., Theodora, E. M., Hou, A., Ginting, N. M. B., Rivai, A., Anggusti, M., Pasaribu, D. D., & Banuari, N. (2023). *Bisnis Dasar Dan Etika Dalam Berbisnis*. MTU Press.
- Pasaribu, K., & Syakira, E. (2025). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3).
- Pratiwi, R. A., & Heriyanto, H. (2023). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Soreang. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(1), 139–150. <https://doi.org/https://doi.org/10.47467/elmal.v5i1.3910>
- Putra, A. D., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2025). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 16(1), 188–200. <https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jseb.v16i1.10158>
- Raodah, R., & Umam, K. U. (2026). Kontribusi Denda Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Urnal Praktik Akuntansi Dan Bisnis*, 1(4).
- Rohita. (2021). *Metode Penelitian Tindakan Kelas Panduan Praktis Untuk Mahasiswa Dan Guru* (1st

- ed.). Deepublish.
- Saputra, M. A., Ismatullah, I., & Nurmilah, R. (2025). Peran Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah, Di Samsat Kota Sukabumi. *Urnal Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan*, 1(4), 573–577.
- Sari, M., Khairunnisa, H., & Handarini, D. (2025). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2023. *Indonesia Economic Journal*, 1(2), 788–810. <https://doi.org/https://doi.org/10.63822/4yg5db04>
- Septriana, P., Sudarma, A., & Tanjung, H. (2025). Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Denda Pajak, Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v10i4.27406>
- Sihombing, E. H., Chaniago, S., & Nasib. (2019). Increase Taxpayer Compliance through Quality of Service , Tax Sanctions , Knowledge and Socialization of Taxation. *Journal of Business and Management (IOSR-JBM)*, 21(11), 17–23. <https://doi.org/10.9790/487X-2111031723>
- Sukmadinata. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Veronika, D. P., & Akbar, F. S. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Penerangan Jalan sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2020. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(5). <https://doi.org/https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.2128>
- Wajdi, F., Seplyana, D., Juliastuti, Rumahlewang, E., Fatchiatuzahro, Halisa, N. N., Rusmalinda, S., Kristiana, R., Niam, F., Purwanti, E. W., Melinasari, S., & Kusumaningrum, R. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif*. WIDINA MEDIA UTAMA.